



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 260/Kep.634-Huk/2006

TENTANG

**PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(P2TP2) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2006-2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Rapat Kerja Nomor : 002/BA/P2TP2/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005;
- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dan implemetnasi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 260/Kep.635-Huk/2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung perlu didukung oleh pengurus yang kapabilitas dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2) Kota Bandung Periode Tahun 2006-2008;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung Periode Tahun 2006-2008
- KEDUA : Susunan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 260/Kep.634-Huk/2006
TANGGAL : 14 Agustus 2006

SUSUSNAN PANITIA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) - KELUARGA BERENCANA (KB) – KESEHATAN
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2006

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung.
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Dra. Hj. Kusmeni S Hartadi, M.Si;
3. Hj. Popong Otdje Djundjunan;
4. Hj. Erna AA Tarmana;
5. Hj. Nani Dada Rosada;
6. Hj. Yetna Maman Suparman;
7. Hj. Attie D. Andjar Rachman, SH;
8. Dra. Kamalia Purbani, MSp;
9. Dr. Komariah, SH;
10. Dr. Bulan Trisna Jelantik;
11. Ir. Hj. R. Hibarni Andam Dewi;
12. Hj. Sunaeni Madjid;
13. Dra. Wiwiek Indaryani, MPd;
14. Hj. Siti Djuariah Sanusi, SH;
15. Dra. Hj. Noneng Siti Kuraesin, MSi;
16. Drg. Hj. Ellen Latjeno S. M.Kes;
17. Dra. Tetty Kusmawati, MKM
- Penanggung jawab : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Hj. Wiwi Priatna (Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung);
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Sekretaris : Pramesti Dewi, SE (Unsur Organisasi Masyarakat Perempuan).

Bidang Data dan Informasi :

Koordinator : Dra. Ine Indriyanti (Unsur Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung).

Anggota : 1. Ir. Ipoy Yulianawati (Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bandung);
2. Ine Gardiani GR (Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bandung);
3. Dra. Rina Dwiyanti (Unsur Kewilayahan);
4. Tetty S. Hasanah (Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
5. Hj. Yossy Irianto (Unsur Dharma Wanita Kota Bandung);
6. Dra. Ida Rosdiana (Unsur Televisi Republik Indonesia Bandung).

Bidang Pelayanan dan Konsultasi :

Ketua : Sri Rahayu (Unsur Ikatan Bidan Indonesia).

Anggota : 1. IPTU Nunu (Unsur Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung);
2. Ny. St. Ahadiat Bakir (Unsur Yayasan A. Ach Hidayat);
3. Ny. Roswita (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Moralita);
4. Ny. Sri Sudarmi (Unsur Gabungan Organisasi Wanita Kota Bandung);
5. Ny. Susi Susilawati (Unsur Masyarakat);
6. Ny. Dedeh (Unsur Departemen Agama Kota Bandung);
7. Ny. Elvy Rosilawaty, MSi (Unsur Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
8. Drg. Aline Pagastuti (Unsur Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut);
9. Dra. Lilis Rosidah (Unsur Bagian Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung);
10. Hikmat Prihadi (Unsur Lembaga Hukum);
11. Wati, SH (Unsur Pengacara Hukum);
12. Ni Wayan Asih (Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung);
13. Dra. SR. Astuti, MSi (Unsur Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi pada Universitas Padjadjaran);
14. Ike Kurniasari (Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat Kiara Condong);
15. Hj. Arieni (Unsur Rumah Sakit Bersalin Astana Anyar);
16. Sri Astrid (Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).

Bidang Litbang dan Iptek :

Ketua : Ir. Felly Lastiawati (Unsur Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);

Anggota : 1. Dra. Yanti Erlianawati (Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

2. Hj. Ir. Siti Homjah, M.S (Pusat Penelitian Peranan Wanita Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran);
3. Nia Wijayanti (Unsur Dinas Koperasi Kota Bandung);
4. Mimin Aminah (Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
5. Lia Maliaty, SH (Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
6. Dra. Omi Rusmiati (Unsur Kantor Sosial Kota Bandung);
7. Lukman Surya S.Sos (Unsur Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
8. Drs. Arief Syaefudin, SH (Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Siti Musfaridah, BSW (Unsur Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

Bidang Pengembangan Jaringan Kemitraan :

Ketua : T. Ratnawati (Unsur Asosiasi Kelompok Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

- Anggota :
1. Etty Kartika Karsaya (Unsur Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia);
 2. Melliana S (Unsur Forum Peduli Air);
 3. Sofiah Sukarno (Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung);
 4. Dra. Fitri Hikmat G (Unsur Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung);
 5. Ega Megantari (Unsur Bagian Badan Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 6. Neni Nuraeni (Unsur Asosiasi Kelompok Usaha);
 7. Dra. Nina Hilman (Unsur Media Massa/Pikiran Rakyat);
 8. Aida Liem (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Perempuan);
 9. Sanni Surya Parnata (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Perempuan);
 10. Hj. Bebey Natawijaya, SH (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
 11. Lia Cahyati, S.Sos (Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan partisipasi Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 12. Wita Ramli (Unsur Gabungan Organisasi Wanita Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA